



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jalan P. Diponegoro No. 1 Telepon 200286 Serang

## LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Nomor : 01/LP-KTI/Inspektorat/2022

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah No : 01/LRHP-KTI/Inspektorat/2022 yang telah melakukan pengujian dan penilaian Karya Tulis Ilmiah serta pertimbangan-pertimbangan lainnya terhadap Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut :

**Judul Karya Ilmiah :**

KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI

**Jenis Karya Ilmiah :**

Saduran - Dipublikasikan

Nama Penyusun : Sri Indah Gameswari, ST, MT.

NIP : 19790921 201001 2 006

Jabatan : Auditor Muda

Pangkat / Golongan : Penata / IIIc

Dengan ini **Mengesahkan** Karya Tulis Ilmiah terlampir untuk dapat diusulkan sebagai angka kredit Unsur Pengembangan Profesi oleh Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan untuk butir kegiatan dan satuan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Permenpan Nomor: 220/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Serang, 22 Juni 2022

**Inspektur Kabupaten Serang**

**Drs. Rudy Suhartanto, M.Si**

NIP. 19670612 198603 1 003

**Tembusan :**

Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Serang, 22 Juni 2022  
Yth Bapak Inspektur  
Kabupaten Serang  
Di -  
tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. HARYADI, S.Sos.,M.Si  
NIP : 19670616 198610 1 001  
Pangkat / Golongan : IV/b  
Jabatan : Inspektur Pembantu 1  
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Serang

Sebagai Ketua Tim Penguji sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Serang Nomor : 700/030/Inspektorat/2022 Tanggal 28 Juli 2022, dengan ini menyatakan hasil pengujian Karya Ilmiah dalam rangka pengusulan angka kredit jabatan fungsional Auditor :

Nama Penyusun : Sri Indah Gameswari, ST, MT.  
NIP : 19790921 201001 2 006  
Jabatan : Auditor Muda  
Pangkat / Golongan : Penata / IIIc  
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Serang

Telah memenuhi persyaratan untuk disahkan oleh Bapak Inspektur Kabupaten Serang sebagai Pimpinan Unit Kerja dan dapat diberikan angka kredit dengan satuan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Permenpan Nomor: 220/2008 ke dalam unsur penilaian angka kredit periode Januari – Juni Tahun 2022 sub unsur pengembangan profesi sesuai yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional Auditor terkait, nilai yang diperoleh telah melewati *Passing grade*  $\geq 2,5$  yang merupakan batas minimal nilai rata-rata dari seluruh penguji. (Hasil Pengujian terlampir)

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 22 Juni 2022  
Ketua Tim Penguji

  
**H. HARYADI, S.Sos.,M.Si**  
NIP: 19670616 198610 1 001

**Hasil Pengujian**

Berdasarkan pengujian terhadap Karya Ilmiah :

Judul : Kecurangan Dan Korupsi Di Sektor Konstruksi

Jenis : Saduran - Dipublikasikan

Oleh Tim Penguji diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Perolehan nilai berdasarkan penguji 1 : 3,6
- b. Perolehan nilai berdasarkan penguji 2 : 3,6
- c. Perolehan nilai berdasarkan penguji 3 : 2,9
- d. Rata-rata nilai :  $(a + b + c) / 3$  :  $\frac{3,6 + 3,6 + 2,9}{3} = 3,4$

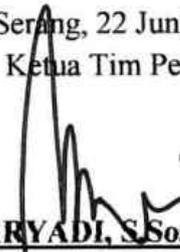
Nilai yang diperoleh *Telah/Belum* melewati *Passing grade*  $\geq 2,5$  sebagai syarat rekomendasi untuk disahkan oleh pimpinan unit kerja

**Penguji 2**



**NIKMATULLOH, SE, M.Si**  
NIP: 19730210 200312 1 003

Serang, 22 Juni 2022  
Ketua Tim Penguji



**H. HARYADI, S.Sos., M.Si**  
NIP: 19670616 198610 1 001

**Penguji 3**



**Emilda Novita Yuzar, SE, M.Si**  
NIP: 19791108 200502 2 004

## **KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI**

Jim Gee, Mark Button, Branislav Hock dan David Shepherd

Diterjemahkan sesuai artikel yang di download dari:  
<https://www.crowe.com/uk/insights/construction-fraud-2021>

# **KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI**

Jim Gee, Mark Button, Branislav Hock dan David Shepherd

Diterjemahkan sesuai artikel yang di download dari:  
<https://www.crowe.com/uk/insights/construction-fraud-2021>

## Daftar Isi

MEMAHAMI DAMPAK KECURANGAN DAN KORUPSI .....	3
1. PENGELUARAN DAN RISIKO INFRASTRUKTUR INGGRIS .....	5
2. KONSTRUKSI : SEBUAH LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KECURANGAN DAN KORUPSI.	5
3. ZONA ABU-ABU KECURANGAN DAN KORUPSI DALAM KONSTRUKSI.....	8
4. JENIS-JENIS KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI.....	9
5. POTENSI BIAYA KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI .....	13
6. PILIHAN UNTUK MEMERANGI KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI.	15
7. KESIMPULAN DAN SARAN .....	18
Tentang penulis .....	19

## **MEMAHAMI DAMPAK KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI**

Kecurangan dan korupsi dalam proyek konstruksi publik yang besar mengakibatkan pembayar pajak tidak mendapatkan nilai uang dari yang seharusnya. Hal ini dapat merusak profitabilitas perusahaan konstruksi yang sah dan memperkaya individu yang tidak jujur dan kejahatan terorganisir. Laporan ini akan mengutip banyak contoh kecurangan dan korupsi dalam konstruksi, dengan fokus khusus pada konstruksi perkeretaapian. Meskipun tidak pernah mungkin untuk menghilangkan perilaku seperti itu, adalah mungkin untuk menguranginya jika kita mengadopsi pendekatan yang tepat.

Ketika Inggris Raya (UK) memulai investasi besar dalam infrastruktur baru, mereka merasa perlu menerapkan pengaturan untuk mencapai hal tersebut. Hal ini penting untuk mendapatkan nilai maksimal dari dana publik dan untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap anggaran tersebut dipertahankan.

### **Temuan dan cara melawannya.**

Laporan ini menyajikan temuan dari penelitian yang mempertimbangkan masalah dan solusi potensial untuk mengatasi kecurangan. Setelah melihat opsi untuk melakukan ini secara efektif, jelas bahwa pendekatan penegakan hukum murni – menyelidiki dan menuntut – hanya akan mengatasi masalah setelah masalah itu terjadi. Hal ini memang diperlukan jika kecurangan dapat dicurigai atau terdeteksi tetapi pendekatan yang lebih proaktif diperlukan, jika kita ingin meminimalkannya dan kerugian konsekuensial terhadap dana publik.

Sama halnya, sementara diskusi saat ini sedang berlangsung tentang peran audit sehubungan dengan kecurangan; auditor, dengan pelatihan dan tujuan profesional mereka, fokus untuk melihat laporan keuangan yang berkaitan dengan periode lalu dan untuk masing-masing organisasi, bukan keseluruhan organisasi yang terlibat dalam proyek-proyek besar. Serupa dengan penegakan hukum, audit memiliki peran penting, tetapi hanya audit seringkali tidak cukup.

### **Bisakah kita belajar dari orang lain?**

Pendekatan yang berhasil diadopsi di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, menarik bagi kami. Pemantau Integritas menyatukan berbagai keterampilan profesional (termasuk para penyelidik, akuntan, dan berbagai keterampilan terkait konstruksi lainnya) dan bila didanai dengan baik, dengan proporsi tertentu dari pengeluaran yang dimaksudkan yang disisihkan untuk pekerjaan mereka, memiliki rekam jejak yang baik.

Yang terpenting, Pemantau Integritas telah diberi peran untuk melihat keseluruhan proyek, mulai dari awal dan kontrak hingga penyelesaian. Mereka juga bekerja secara proaktif untuk memperkuat budaya integritas dan menumbuhkan dan memobilisasi mayoritas personil yang jujur dan untuk mencegah dan mengecilkan personil minoritas yang tidak jujur.

Mengubah keseimbangan perilaku manusia sehingga lebih sedikit kecurangan dan korupsi dicoba di tempat pertama, sambil mengakui bahwa pekerjaan akan selalu dibutuhkan untuk mengatasinya di tempat yang masih terjadi, adalah pendekatan yang masuk akal; dan yang dirancang untuk meminimalkan sejauh mana dana publik dialihkan dari tujuan yang dimaksudkan.

**Jim Gee**  
Mitra dan Kepala Forensik  
Layanan, Crowe UK

## **1. PENGELUARAN DAN RISIKO INFRASTRUKTUR INGGRIS**

Pemerintah Inggris saat ini terpilih pada tahun 2019 berdasarkan manifesto yang mencakup investasi dalam proyek infrastruktur baru dan keinginan untuk melanjutkan jalur kereta api Kecepatan Tinggi 2 (HS2) dengan perkiraan harga £106 miliar. Selain itu, pemerintah mengungkapkan dalam Rencana Anggaran Maret 2020 untuk menghabiskan £600 miliar untuk proyek infrastruktur selama lima tahun ke depan. Seperti diketahui, proyek konstruksi memiliki risiko peningkatan biaya. Mereka juga sangat berisiko tinggi untuk kecurangan dan korupsi.

**Laporan ini akan mengeksplorasi potensi risiko pendanaan ini dengan:**

1. menelaah keunikan faktor struktural dan kultural yang menjadikan kecurangan dan korupsi memiliki risiko sangat tinggi
2. mengeksplorasi beberapa risiko kecurangan dan korupsi pada konstruksi menggunakan contoh nyata dari proyek sebelumnya di Inggris dan proyek serupa di luar negeri
3. memberikan beberapa rekomendasi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengamankan pendanaan ini.

## **2. KONSTRUKSI : SEBUAH LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KECURANGAN DAN KORUPSI**

Ada berbagai macam faktor struktural dan budaya yang membuat sektor konstruksi rentan terhadap kecurangan dan korupsi, terutama jika menyangkut proyek- proyek besar.

### **a. Keharusan Politik Untuk Menyelesaikan Proyek**

Di semua proyek konstruksi akan ada keharusan untuk menyelesaikannya tepat waktu, tetapi dalam proyek-proyek yang didanai publik, di mana ada manfaat politik terkait dengan keberhasilan proyek, imperatif ini kemungkinan akan lebih kuat. Mengungkap pemborosan, kecurangan, dan korupsi kadang-kadang dianggap salah sebagai kemungkinan untuk menggagalkan pelaksanaan proyek dengan memperlambatnya, dan itu dapat mengarah pada langkah-langkah untuk mengungkapnya tidak diprioritaskan.

### **b. Tidak Ada Dua Proyek Yang Sama**

Proyek skala besar jarang sama, membuat perbandingan dan prediksi tentang biaya menjadi lebih sulit. Misalnya, pembangunan jalur kereta api baru melalui area belantara akan sulit mendapatkan pembanding yang setara. Ini berarti perkiraan biaya potensial kemungkinan akan berubah. Ini juga berarti sangat sulit untuk membandingkan biaya antar proyek, yang menyebabkan potensi untuk menempatlan

biaya yang berlebihan dan menjadi potensi kecurangan. kecurangan dan korupsi juga bisa disembunyikan dengan cara peningkatan biaya.

**c. Penundaan dan Pembengkakan biaya**

Sifat unik dari banyak proyek konstruksi dapat menyebabkan tantangan yang tidak terduga, yang menyebabkan keterlambatan proyek. Ini dapat mengakibatkan biaya tambahan, yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bermoral.

**d. Rantai Pasokan Yang Kompleks**

Proyek konstruksi skala besar selalu menggunakan rantai pasokan yang panjang dan beragam, yang melibatkan banyak kontraktor dan profesional, dan sering kali melibatkan beberapa negara. Kompleksitas ini melahirkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para penipu. Setiap sub-bagian dari rantai selalu melibatkan beberapa bentuk tender di bawah kontrak utama, meningkatkan jumlah peluang untuk kecurangan dan korupsi. Bagi mereka yang memimpin seluruh proyek, akan sangat sulit untuk mendapatkan gambaran totalitas dari mereka yang melakukan pekerjaan dan pengeluaran terkait.

**e. Kemenangan Pada Penawar Dengan Harga Terendah Menyebabkan Penawar Mencari Cara Lain Untuk Mendapatkan Keuntungan.**

Pemerintah ingin melindungi para pembayar pajak menjadikan kecenderungan untuk memberikan proyek kepada penawar dengan nilai terendah. Hal ini mendorong beberapa perusahaan untuk menawar dengan harga rendah, dan kemudian mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam beberapa kasus hal ini bisa menyebabkan kecurangan.

**f. Biaya Besar Memungkinkan Kecurangan/ Pemborosan Tersembunyikan**

Biaya yang sangat besar dari banyak proyek konstruksi menyebabkan kecurangan dan pemborosan lebih mudah disembunyikan. Ada lebih banyak ruang untuk kecurangan pada proyek £ 100 miliar, dibandingkan dengan proyek £ 25 juta.

**g. Kualitas Pekerjaan Yang Dilakukan Dapat Disembunyikan**

Sifat dari kebanyakan proyek konstruksi adalah pekerjaan yang dilakukan seringkali dapat disembunyikan. Spesifikasi untuk kualitas beton tertentu, perpipaan, kabel dan lainnya dapat diabaikan untuk menurunkan biaya tanpa terlihat jelas. Hal ini dapat terjadi karena, misalnya, kabel letaknya di dalam tembok dan pipa tertanam dalam bawah tanah. Selain itu, pekerjaan mungkin juga harus dilakukan di daerah terpencil, susah diakses atau berbahaya, membuat pemeriksaan menjadi lebih sulit.

**h. Otonomi Lokal Dari Site Manager.**

Site Manager sering memiliki otonomi di area tertentu untuk memastikan pekerjaan terlaksana sesuai jadwal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan tepat waktu, mereka sering memiliki keleluasaan untuk menyetujui perubahan dan melakukan pembelian tambahan. Hal ini kerap dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan baik oleh site

manajer yang berkolusi dengan kontraktor atau hanya dengan memanfaatkan tekanan untuk menyelesaikan sesuatu. Data kinerja untuk kontrak juga sering diadakan secara lokal di lokasi, yang juga memberikan peluang untuk manipulasi data.

**i. Manajemen Proyek Yang Tidak Memadai**

Terkadang pendukung dan manajer proyek konstruksi tidak memiliki atau memiliki namun terbatas, pengalaman proyek skala besar sebelumnya dan berbagai keterampilan khusus yang diperlukan. Mereka sering ditempatkan pada posisi yang menantang untuk memantau dan mengatur kontrak. Pengawasan terhadap beberapa proyek tidak selalu memadai, sehingga membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya.

Beberapa area yang mungkin tidak memadai pengawasannya dan dapat disalahgunakan meliputi:

1. Kurangnya kompetensi dan sumber daya untuk mengelola proyek
2. Standar, spesifikasi dan kontrak yang tidak jelas dan terbuka untuk dimanfaatkan
3. Uji tuntas pemasok yang tidak memadai (riwayat pengalaman, kualifikasi, kecurigaan kecurangan dan korupsi, dll)
4. Kompleksitas kontrak/rencana yang tidak memperjelas akuntabilitas (satu perusahaan merancang sementara yang lain melaksanakan, tetapi siapa yang bertanggung jawab jika perencanaan tidak berhasil?)

**j. Lokasi Proyek**

Beberapa proyek didanai pemerintah dengan anggaran yang berasal dari bantuan luar negeri dan ini justru sering terjadi di negara-negara di mana terdapat bukti bahwa risiko kecurangan dan korupsi yang jauh lebih besar. Misalnya, membangun jalan di daerah terpencil di Afghanistan kemungkinan besar memiliki risiko yang jauh lebih tinggi daripada di Inggris.

**k.**

Red Tape adalah peraturan yang berlebihan atau penerapan terhadap aturan resmi yang kaku yang dianggap mengurangi produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan. Sebuah site konstruksi bisa jadi harus tunduk pada beberapa regulator dengan pengawasan, beberapa di antaranya berpotensi jadi faktor yang memperlambat proyek.

Di Inggris, hal ini dapat mencakup perencanaan, persetujuan peraturan bangunan, kesehatan dan keselamatan dan pemeriksaan imigrasi dan lainnya. Untuk proyek-proyek yang berada di bawah tekanan waktu, hal ini dapat menyebabkan individu melakukan praktik korupsi untuk memuluskan potensi pelanggaran peraturan dan memungkinkan konstruksi lebih cepat.

**l. Budaya sektor konstruksi**

Terkait dengan berbagai peluang untuk kecurangan dan korupsi, terdapat banyak bukti tentang budaya di sektor konstruksi yang rawan kecurangan dan korupsi.

Misalnya, Transparency International Bribe Payers Index Tahun 2011, berbagai sektor dinilai berdasarkan persepsi mereka tentang pembayaran suap. Dari 19 sektor yang terdaftar, 'kontrak pekerjaan umum dan konstruksi' dinilai paling korup. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh PwC pada tahun 2014 menemukan bahwa dari semua sektor yang mengalami kejahatan keuangan, sektor teknik dan konstruksi memiliki tingkat penyuaipan dan korupsi tertinggi.

Sebuah laporan oleh Chartered Institute of Building diterbitkan pada tahun 20135 berdasarkan survei anggotanya menemukan bahwa:

- 49% menganggap korupsi di sektor ini adalah hal biasa
- 38% telah menemukan aktivitas kartel setidaknya sekali
- 35% mengaku pernah ditawari suap atau insentif setidaknya sekali
- lebih dari 50% berpikir bahwa kecurangan dan korupsi telah meningkat atau tetap sama selama lima tahun sebelumnya.

Sektor konstruksi menyajikan struktur yang memfasilitasi kecurangan dan korupsi yang diperparah lebih lanjut oleh budaya rawan kecurangan dan korupsi, yang jauh lebih tinggi daripada sektor lain.

### **3. ZONA ABU-ABU KECURANGAN DAN KORUPSI DALAM KONSTRUKSI**

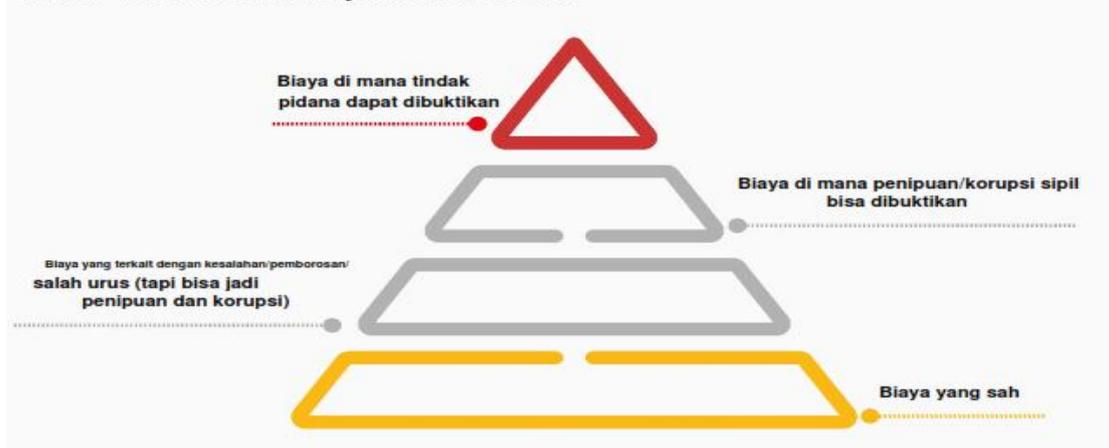
Kecurangan dan korupsi mungkin tampak cukup sederhana bagi kebanyakan individu untuk didefinisikan. Namun, kompleksitas konstruksi dan pengadaan membuka zona abu-abu yang substansial di mana tindakan pembuktian curang atau korup terhadap standar pidana, dan bahkan perdata, seringkali sulit. Misalnya, penggunaan spesifikasi pekerjaan yang berbeda, yang dibenarkan dengan alasan lingkungan konstruksi yang sulit (yang sebelumnya tidak dipertimbangkan), yang mengarah pada biaya yang lebih tinggi, dapat menjadi sah atau salah urus atau dirancang untuk kecurangan atau jenis kriminal lainnya.

Kekhasan dari hukum pengujian untuk membuktikan kecurangan dan/atau korupsi, ketepatan atau ketidaktepatan kontrak dan fakta tentang apa yang terjadi, menciptakan campuran di mana kasus untuk membuktikan pelanggaran utama seringkali sangat sulit. Namun, ini tidak berarti jika kecurangan dan korupsi tidak dapat dibuktikan maka pengeluaran tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, setiap analisis dari proyek konstruksi skala besar akan menunjukkan pembagian dari penggunaan biaya, yaitu pengeluaran yang sah (dalam angka yang lebih tinggi dari biaya lain), pengeluaran yang tidak sah, dan pengeluaran abu-abu yang penggunaannya dapat berupa kecurangan, kesalahan teknis, pemborosan, atau kesalahan manajemen.

Seperti yang dicatat oleh Satuan Tugas Kejahatan Terorganisir New York : “Batas antara kecurangan yang bersifat kriminal dan pemborosan dan penyalahgunaan yang bersifat non-kriminal sulit untuk ditarik, terutama di lingkungan bisnis yang kaya dengan kebusukan, penghematan, pelanggaran kontrak, dan perselisihan. Kasus kecurangan yang jelas juga sulit untuk diidentifikasi karena kontraktor yang tidak bermoral sering kali dapat memberikan setidaknya penjelasan yang masuk akal untuk biaya yang meragukan dan kinerja pekerjaan yang buruk. Seringkali penjelasan ini berbentuk tuntutan balik terhadap Pemerintah atas dugaan kesalahan desain,

keterlambatan, dan/atau persetujuan Pemerintah secara eksplisit atau diam-diam. Oleh karena itu, lebih baik berpikir dalam istilah “kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan” daripada hanya dalam istilah “kecurangan.”

**Gambar 1. Zona abu-abu biaya dalam konstruksi**



#### **4. JENIS-JENIS KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI**

Beberapa bentuk kecurangan dan korupsi yang paling umum disektor konstruksi dijelaskan di bagian ini, menggunakan contoh nyata dari konstruksi untuk menggambarkan jika memungkinkan. Seperti yang telah disebutkan, beberapa perilaku yang dijelaskan, tergantung pada fakta kasus dan konteks hukum, dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal atau hanya gugatan hukum perdata jika dikategorikan sebagai salah urus dan pemborosan.

Penting untuk dipahami dari sudut pandang sponsor proyek dan penyandang dana bahwa keduanya adalah masalah potensial yang dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi, tidak peduli hasil pembuktiannya secara hukum.

##### **a. Korupsi dalam proses tender/lelang :**

###### **1. Kolusi**

Salah satu bentuk korupsi adalah kolusi antar peserta lelang dalam proses tender. Perusahaan pesaing mengesampingkan perbedaan untuk mencurangi proses dan beberapa pihak mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau tidak, sehingga memungkinkan pesaing untuk memenangkan kontrak pada harga yang lebih tinggi daripada jika ada persaingan terbuka. Luasnya masalah terungkap pada tahun 2009 ketika Office of Fair Trading (OFT) mendenda 103 perusahaan konstruksi dengan total £129,2 juta untuk berkolusi dengan pesaingnya.

## 2. Penyuapan

Bentuk korupsi lain yang umum dalam proses tender/lelang adalah penyuapan oleh perusahaan untuk memenangkan kontrak konstruksi. Pada tahun 2016 Sweett Group Plc didenda £2,25 juta setelah ditemukan, melalui anak perusahaan, telah melakukan pembayaran korup untuk mengamankan kontrak untuk membangun sebuah hotel di Abu Dhabi.

Dalam kasus lain dari Inggris, terkait dengan peningkatan stasiun kereta api Farringdon, empat orang dihukum karena pelanggaran terkait korupsi. Kecurangan berpusat pada seorang manajer dari salah satu perusahaan konstruksi yang telah menerima £140.000 suap untuk memberikan informasi orang dalam untuk memungkinkan perusahaan lain untuk memenangkan sub-kontrak. Dampak kecurangan ini adalah kontrak awal sebesar £2,1 juta naik menjadi £5,2 juta.

### **b. Korupsi dalam tahap konstruksi**

Seperti yang telah dicatat sebelumnya dilaporkan, site konstruksi di sebagian besar wilayah tunduk pada peraturan dan pengawasan ekstensif oleh pejabat publik serta klien. Pekerjaan dari para penegak peraturan dan pengawas ini dapat mengekspos pekerjaan yang buruk atau juga berpotensi memperlambat proyek. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa orang-orang ini dapat menjadi sasaran pengaruh korupsi untuk tidak menjalankan peran mereka dengan benar. Sebagai contoh, ada banyak skandal di New York di masa lalu mengenai pejabat korup.

### **c. Kecurangan terkait faktur**

#### 1. Faktur Palsu

Kompleksitas pada proyek konstruksi menghasilkan sejumlah besar faktur dari banyak pemasok. Hal ini memberikan banyak peluang terjadinya kecurangan. Mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan membayar pemasok memiliki peluang, jika kontrolnya lemah, untuk melakukan kecurangan dengan mengirimkan faktur palsu. Dalam satu kasus seperti itu, seorang manajer pada pemerintah daerah di Inggris bersekongkol dengan kontraktor bangunan yang ada untuk menyerahkan faktur dari mana dia bisa menyedot uang ke anak perusahaan yang telah dia dirikan sebelumnya untuk pekerjaan palsu dengan nilai lebih dari £ 1 juta.

#### 2. Penagihan yang berlebihan

Penagihan yang berlebihan di beberapa proyek dapat menjadi substansial. Pada tahun 2016 di Spanyol, 14 orang ditangkap atas dugaan kecurangan yang melibatkan pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi antara Madrid dan Barcelona, dengan tuduhan bahwa negara telah membayarkan kelebihan penagihan sebesar €82 juta.

Pada skala yang lebih kecil, investigasi terhadap tiga proyek konstruksi yang ditugaskan oleh Dewan Kota Stoke-on-Trent menemukan bukti kecurangan

yang signifikan 'pada keseimbangan probabilitas'. Ini termasuk pemalsuan dokumen pengadaan untuk sekadar menambah biaya, pembuatan faktur untuk pekerjaan tiga bulan sebelum selesai, dan penyerahan faktur dari proyek lain yang salah dibebankan ke pemerintah.

Terkadang pembengkakan faktur terjadi untuk menutupi biaya penyuaipan. Misalnya, dalam satu kasus dari AS yang melibatkan Bloomberg LLP dan puluhan juta dolar, diduga seorang karyawan yang korup bersekongkol dengan kontraktor utama dan sub-kontraktor untuk mengamankan suap yang dibayar dengan membengkakan tagihan utama.

Cara lain terjadinya kecurangan dalam konstruksi adalah penagihan untuk pekerjaan yang masih kurang atau penggunaan bahan yang berkualitas lebih rendah, produk atau desain yang lebih murah daripada yang ditentukan dalam kontrak. Dalam satu kasus dari Amerika Serikat satu pemasok untuk pembangunan Proyek Metrorel Dulles menyelesaikan gugatan hukum perdata sebesar \$1 juta setelah ditemukan staf telah memalsukan hasil tes pada kualitas panel beton yang telah dipasang.

Dalam kasus lain di Hong Kong, terkait dengan proyek perluasan rel senilai HK\$97,1 miliar, desain yang disetujui ditandatangani oleh para inspektur sebagai telah selesai, yang melibatkan 23.500 skrup. Belakangan diketahui bahwa ada 2.000 skrup lebih sedikit dan dinding pembatasnya juga diperpendek, dengan justifikasi perusahaan 'kesulitan dalam konstruksi' untuk perubahan tersebut.

Cara lain di mana kecurangan dapat terjadi adalah dengan menambahkan 'karyawan hantu' ke daftar gaji. Hal ini dapat bervariasi dari kecurangan kriminal secara langsung hingga perilaku yang mungkin tidak etis, pemborosan dan salah manajemen, tetapi belum tentu memenuhi standar kecurangan baik perdata maupun pidana. Dalam salah satu contoh, seorang manajer konstruksi untuk Balfour Beatty dihukum karena kecurangan £165.000 setelah menambahkan dua pekerja palsu ke daftar gaji dengan upah yang dibayarkan langsung ke rekening pelaku.

Contoh lain adalah perpanjangan dari kereta bawah tanah New York di bawah Grand Central Terminal di mana 900 karyawan digaji, tetapi seorang akuntan hanya bisa mengidentifikasi 700 pekerjaan yang perlu dilakukan dan karyawan ini dibayar \$1.000 per hari. Ini, di antara faktor-faktor lain, menyebabkan salah satu proyek kereta api paling mahal dalam sejarah New York dengan biaya \$3,5 miliar per mil, bila dibandingkan dengan perluasan lain di kota, yang rata-rata \$2,5 miliar (Second Avenue) dan \$1,5 miliar (Hudson Yard). Ini juga dibandingkan dengan rata-rata untuk proyek lain di AS dan negara lain sebesar \$500 juta per mil.

#### **d. Pencurian aset**

Kejahatan dalam konstruksi juga dapat melibatkan pencurian sederhana. Pembelian barang dalam jumlah besar seperti batu bata, kayu, pipa, kabel dll dapat menggoda beberapa karyawan korup untuk mencuri untuk dijual atau digunakan dalam proyek lain yang mereka dibayar. Barang-barang seperti itu juga, bersama dengan peralatan

pabrik, juga menjadi target penjahat eksternal. Dalam satu laporan di Inggris, pencurian situs sektor konstruksi diperkirakan dengan biaya £800 juta per tahun.

**e. Karyawan yang tidak memenuhi syarat**

Industri konstruksi penuh dengan perdagangan di mana kualifikasi spesialis diperlukan, dari tukang listrik, tukang ledeng, dan insinyur hingga surveyor, hanya untuk beberapa nama. Beberapa kecurangan terjadi ketika orang melamar atas inisiatif mereka sendiri, membuat kualifikasi atau kontraktor memfasilitasi penggunaan staf yang tidak memenuhi syarat. Dalam contoh yang terakhir, dalam pembangunan kembali World Trade Centre, New York, tiga kontraktor ditemukan telah membayar suap kepada pejabat untuk memungkinkan kontrak dijamin di mana keluarga dan teman dipekerjakan sebagai tukang listrik tanpa kualifikasi formal. Mereka telah memanfaatkan lebih dari \$1 juta dalam bentuk upah dan tunjangan sebelum ditemukan.

**f. Karyawan ilegal**

Biaya tenaga kerja tinggi di banyak proyek konstruksi dan bagi oknum, penggunaan imigran gelap yang lebih murah adalah pilihan. Dalam satu kasus pada tahun 2020, seorang majikan yang bekerja pada pembangunan Rumah Sakit Metropolitan Midland dipenjara setelah penggerebekan oleh Petugas Imigrasi menemukan 38 pekerja ilegal yang bekerja di proyek tersebut, semuanya dari India.

**g. Penyalahgunaan dana kompensasi**

Beberapa proyek konstruksi melibatkan pemberian kompensasi untuk pembelian wajib tanah dan/atau penurunan nilai properti. Di Cina telah ada bukti kecurangan dalam dana yang digunakan untuk kompensasi dan juga ada bukti masalah dalam proyek kereta api di Kenya. Dalam proyek HS2 telah ada tuduhan – sejauh ini tidak terbukti – pemilik rumah dan bisnis 'ditipu dari sejumlah besar uang' dengan dipaksa untuk menjual dengan harga rendah.

**h. Pemerasan**

Di beberapa negara, kelompok kejahatan terorganisir sangat penting dan konstruksi sering kali sektor yang ditargetkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Dengan keharusan agar proyek berjalan dan berbagai peluang untuk memperlambatnya, ancaman kejahatan terorganisir yang mengintervensi untuk memperlambat kemajuan memberikan tekanan untuk membayar para kriminal China telah berkembang pesat jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan dalam melakukannya telah mengalami berbagai kecurangan dan korupsi disorot dalam studi kasus berikut :

Pembangunan rel kereta api Cina, Cina telah menciptakan jaringan rel kecepatan tinggi terbesar di dunia dengan panjang lebih dari 29.000 km, sebagian besar dibangun (atau sedang dibangun) selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2018 saja, proyek tersebut telah menghabiskan lebih dari \$116,8 miliar untuk proyek-proyek semacam itu. Dengan sejumlah besar uang dan struktur dan budaya konstruksi, ada banyak contoh kecurangan dan korupsi. Dalam salah satu skandal

penyuapan terbesar yang berkaitan dengan perkeretaapian, mantan Menteri Perkeretaapian di China, Liu Zhijun, yang telah memimpin perluasan besar-besaran kereta api berkecepatan tinggi, dihukum karena menerima suap sebesar £6 juta<sup>28</sup>. Pada tahun 2011 penyidik menemukan penyelewengan dana sebesar \$30 juta dalam pembangunan gedung Kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Shanghai hanya dalam periode tiga bulan. Menurut laporan tersebut, "...banyak kasus prosedur pengadaan yang cacat, pengisian yang berlebihan, biaya yang tidak dapat dijelaskan dan kuitansi palsu yang terkait dengan proyek" telah diidentifikasi.

Pada 2012, Kantor Audit Nasional Tiongkok menemukan kecurangan pada proyek kereta api kecepatan tinggi Beijing-Shanghai. Uang yang disisihkan untuk kompensasi disalahgunakan, dengan dokumen palsu digunakan untuk mengamankannya dan lebih dari 196 miliar yuan dihabiskan untuk pengambilalihan ketika anggarannya 163,8 miliar yuan. Ia juga menemukan lebih dari 834 juta yuan (\$134 juta) pembelian yang tidak dilakukan melalui prosedur yang sesuai.

Pada tahun 2013, delapan orang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi kereta api milik negara dihukum oleh Partai Komunis setelah ditemukan bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari \$100 juta untuk biaya keramah-tamahan, dengan masalah pada faktur dan rekening sebagai pengeluaran. Misalnya, China Railway Corporation menghukum sejumlah anak perusahaan setelah inspeksi jaringan kecepatan tinggi rute Shanghai-Kunming, yang menunjukkan pekerjaan buruk dan praktik kecurangan termasuk: tidak mengikuti desain, pengawasan proyek yang buruk, dan pengerjaan yang buruk. Bank Dunia telah melarang beberapa perusahaan konstruksi kereta api Cina atas kecurangan dan korupsi dalam proyek konstruksi.

Pada tahun 2019, Konstruksi Kereta Api China Ltd dicekal selama sembilan bulan untuk pelanggaran pada Proyek perbaikan Koridor Timur-Barat di Georgia setelah ditemukan telah mengirimkan informasi yang salah yang dianggap sebagai praktik kecurangan di bawah Pedoman Pengadaan Bank Dunia. Juga, pada tahun 2019 China Railway First Group dicekal menyusul bukti praktik kecurangan sehubungan dengan Proyek Dasu Hydropower Tahap I di Pakistan.

## **5. POTENSI BIAYA KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI**

Sering diasumsikan bahwa tindakan tertentu, seperti korupsi, sulit diukur secara finansial, dibandingkan dengan kecurangan. Namun, dalam banyak kasus, korupsi pada akhirnya dibayar dengan kecurangan. Misalnya, suap kepada pejabat untuk mengamankan kontrak atau untuk 'mengubah' dan 'menutup mata' terhadap pelanggaran peraturan pada akhirnya akan menemukan jalannya ke faktur yang disembunyikan sebagai beberapa bentuk biaya lainnya. Namun, korupsi tertentu sangat sulit diukur. Misalnya kolusi antara penawar untuk menaikkan harga kontrak akan menyebabkan kontrak dengan harga lebih tinggi, yang jika kolusi tidak dapat dibuktikan, akan sangat sulit untuk dideteksi dan oleh karena itu harus diukur biayanya.

Hal ini tidak membuat perkiraan kecurangan di proyek konstruksi lebih mudah. Sejarah memberikan beberapa contoh yang sangat berguna tentang biaya kecurangan dan

korupsi. Misalnya, di New York pada tahun 1858, \$250.000 dialokasikan untuk pembangunan Gedung Pengadilan. Empat tahun dalam proyek William Tweed merebut kendali proyek dan 10 tahun kemudian selesai dengan biaya \$ 13 juta, dengan \$ 9 juta disedot oleh Tweed dan rekan-rekannya — peningkatan 52 kali lipat harga dan setidaknya 70% dari harga tersebut di curangi atau di korupsi.

Tabel 1 menunjukkan contoh yang lebih baru dan bervariasi dari perkiraan biaya korupsi. Kualitas estimasi dinilai oleh metodologi yang digunakan dan sejauh mana estimasi tersebut dapat diterapkan pada sektor yang lebih luas.

Tabel 1: Perkiraan biaya kecurangan dan korupsi dalam konstruksi

Pengarang	Memperkirakan	Kualitas Perkiraan
de Jong dkk (2009) <sup>35</sup> . Berdasarkan perkiraan industri secara global.	10%	Rendah
Sohail dan Cavill (2008) <sup>37</sup> . Berdasarkan perkiraan dari American Society of Civil Engineers secara global.	10,6%	Rendah
Forum Ekonomi Dunia (2016) <sup>38</sup> . Berdasarkan perkiraan industri secara global.	10%-30%	Rendah
Grant Thornton (2013) Berdasarkan laporan industri di Inggris.	10%	Rendah
Latihan pengukuran kerugian kecurangan pengadaan (fraud and error) <sup>39</sup> .	7,8%	Sedang
Perpanjangan Jubilee Bawah Tanah London. Satu skema korup diperkirakan menelan biaya £200 juta karena kontrak yang meningkat yang akhirnya diberikan pada proyek £3,5 miliar <sup>40</sup> . (Standar Malam, 2005)	5,7%	Sedang
PWC/ECORYS <sup>41</sup> . Berdasarkan penyelidikan rinci biaya korupsi dalam pengadaan publik di 8 negara anggota.	1,9% - 2,9%	Tinggi

### Perkiraan persentase kecurangan dan korupsi dalam konstruksi

Berdasarkan tabel di atas, kemungkinan kecurangan dan korupsi dalam konstruksi adalah yang paling kecil, yaitu 1,9%, hingga 10% (walaupun beberapa perkiraan bahkan lebih tinggi). Jika kita menggunakan dua titik ekstrem ini dan titik tengah 5,95%, kita dapat menggunakan angka ini untuk memperkirakan berapa biaya kecurangan dan korupsi.

### Potensi kerugian saat menggunakan HS2 sebagai contoh

Peningkatan biaya HS2 telah didokumentasikan dengan baik di media. Persetujuan untuk skema untuk melanjutkan telah diberikan atas dasar itu bisa menelan biaya antara £ 72 miliar dan £ 110 miliar. Atas dasar itu, dalam proyek ini saja, kecurangan dan korupsi

dapat terjadi, dengan menggunakan perkiraan biaya total yang lebih rendah sebesar £72 miliar, dan menerapkan persentase di atas:



### Potensi kerugian pada proyek pemerintah Inggris di masa depan

Selama lima tahun ke depan pemerintah berencana untuk menghabiskan total £600 miliar untuk proyek infrastruktur yang melibatkan jalan, kereta api, broadband, dan perumahan. Sekali lagi menerapkan tingkat rendah, titik tengah dan tinggi pada angka-angka ini akan menghasilkan kerugian selama lima tahun dari:



Untuk menempatkan hal ini dalam konteks, kecurangan jaminan sosial dipandang sebagai penyebab utama masalah oleh pemerintah dengan beberapa ribu staf yang didedikasikan untuk memerangi itu. Menurut perkiraan baru-baru ini, yang sebagian besar dibangun di atas data berkualitas tinggi, pada 2018-19 adalah £2,3 miliar<sup>43</sup>.

## 6. PILIHAN UNTUK MEMERANGI KECURANGAN DAN KORUPSI DI SEKTOR KONSTRUKSI

Bagian berikut ini menjelaskan secara singkat dan menilai beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan untuk memerangi masalah kecurangan dan korupsi dalam pengadaan konstruksi.

Opsi ini berhubungan dengan:

1. penegakan hukum
2. pengelolaan internal belanja publik
3. pengawasan eksternal.

## **1. Penegakan hukum**

Asumsi paling jelas yang mungkin dibuat beberapa orang adalah untuk berinvestasi dalam sumber daya polisi yang lebih besar untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kecurangan dan korupsi di sektor ini. Lagi pula, Inggris mengadopsi Undang-Undang Penyipuan 2010 yang semakin ditegakkan. Selain itu, Inggris telah mengadopsi serangkaian Arahan Pengadaan Publik UE yang mencakup jaminan tambahan terhadap kecurangan dan korupsi. Namun, melihat masalah korupsi dan kecurangan murni dari perspektif penegakan akan menjadi tanggapan yang salah. Investigasi terkait korupsi sangat memakan waktu, mahal dan rentan terhadap kegagalan.

Misalnya, penyelidikan atas perpanjangan London Underground Jubilee Line oleh Kantor kecurangan Serious, yang sebagian besar gagal (satu orang mengaku bersalah) menelan biaya sekitar £60 juta.

Kecurangan dan korupsi hanya dapat diselidiki jika terdeteksi atau dicurigai. Kemungkinan terdeteksi ini sangat rendah terutama dalam hal kecurangan dengan volume tinggi dan nilai yang rendah.

Pengejaran penjahat penuntutan oleh polisi kantor audit lainnya jangan menjadi pusat strategi untuk memerangi kecurangan dan korupsi, meskipun jelas itu harus menjadi bagian dari strategi dalam memerangi korupsi. Mekanisme peradilan lainnya juga tidak tampak sangat efektif. Misalnya, pemulihan untuk pengadaan publik dan peraturan pengadaan publik sangat sempit cakupannya. Mereka sebagian besar berfokus pada siklus pengadaan yang sebenarnya. Masalahnya adalah korupsi dan kecurangan sering terjadi di luar siklus ini, sebelum proses penawaran yang sebenarnya dan selama tahap penyerahan proyek.

Inilah alasan kami harus melampaui perspektif penegakan hukum dan fokus pada manajemen internal dan jaminan eksternal bahwa uang publik dibelanjakan dengan baik.

## **2. Manajemen Internal Pengeluaran Publik**

Kompleksitas proyek konstruksi dan skalanya yang besar memerlukan pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Manajemen ini dicirikan oleh kebijaksanaan yang signifikan dari mereka yang bertanggung jawab atas pengeluaran publik. Di satu sisi, proyek yang kompleks memerlukan kebijaksanaan manajerial dan harus memungkinkan proses pengambilan keputusan yang fleksibel. Di sisi lain, kontrol dan akuntabilitas mereka yang membelanjakan uang publik sangat penting.

Untuk memastikan pengeluaran publik yang efektif, akademisi dan pembuat kebijakan di seluruh dunia telah membahas langkah-langkah pengadaan yang tepat. Langkah-langkah ini bersifat umum dan khusus untuk korupsi. Pertimbangkan, misalnya, laporan pengadaan publik dari Himpunan Auditor Eropa (2016) menunjukkan bahwa untuk berhasil menjaga jumlah kesalahan dan kecurangan tetap rendah, mereka perlu berbuat lebih banyak untuk mendorong partisipasi sektor swasta. Lebih banyak partisipasi juga berarti lebih banyak kompetisi dan penawaran yang

lebih baik dari sektor swasta. Pasar yang lebih kompetitif dapat terkait dengan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Salah satu langkah tersebut dapat berupa konsultasi pasar awal, yang dapat meningkatkan aksesibilitas pengadaan untuk usaha kecil dan menengah. Sementara beberapa dari langkah-langkah ini tidak spesifik korupsi, mereka mencakup banyak korupsi dan zona abu-abu terkait kecurangan yang dibahas di bagian sebelumnya dari laporan ini. Sebagai contoh, kewajiban Negara Anggota UE untuk memastikan perlindungan pelapor korupsi, kecurangan, dan kejahatan lainnya relatif baru dan memiliki nilai di luar pengadaan publik. Demikian pula, perusahaan konstruksi besar perlu memiliki kebijakan whistleblowing dan langkah-langkah efektif untuk melindungi whistleblower. Terinspirasi oleh undang-undang whistleblowing AS, diskusi di Inggris dan dinegara-negara Eropa lainnya telah apakah whistleblower harus, atau tidak, diberi penghargaan. Ini adalah diskusi yang diperlukan, mengingat fakta bahwa ratusan warga negara non-AS telah diberi hadiah untuk info yang diberikan kepada otoritas AS.

### **3. Pengawasan Eksternal: Model Monitor Integritas AS**

Salah satu opsi yang paling menarik adalah model Pengawasan Integritas AS, yang pendahulunya dapat ditelusuri ke Undang-Undang Inspektur Jenderal AS tahun 1978, yang menyediakan kerangka kerja untuk pemantauan integritas. Potensi peran tersebut, bagaimanapun, didorong oleh Satuan Tugas Kejahatan Terorganisir New York, yang menerbitkan laporan ekstensif pada tahun 1989 tentang kecurangan dan korupsi endemik di industri konstruksi New York. Laporan ini mengungkap sifat dan luasnya masalah di sektor ini, tetapi yang paling signifikan menetapkan model untuk pencegahan masalah ini. Banyak alat yang dianjurkan, tetapi yang paling penting adalah mengadvokasi Certified Investigative Auditing Firms (CIAF).

Laporan mencatat: "Jadilah firma independen, dilisensikan oleh DOI (Departemen Investigasi Kota New York), dengan investigasi, audit, pencegahan kerugian, teknik, dan keterampilan lain yang diperlukan untuk mengawasi aktivitas konstruksi di lokasi dan praktik pencatatan. Kontraktor utama pada proyek pekerjaan umum lebih dari \$5 juta akan diminta untuk mempekerjakan CIAF, dengan minimal dua persen dari biaya proyek yang didedikasikan untuk mendanai operasi CIAF. Penggunaan CIAF harus menghasilkan penghematan yang cukup untuk membenarkan biaya mereka.

Laporan tersebut selanjutnya berargumen bahwa pentingnya membersihkan sektor tersebut berarti bahwa: "Bahkan jika tabungan yang sah kurang dari dua persen dari harga proyek, manfaat sosial yang diperoleh dari pengurangan korupsi dan pemerasan akan membenarkan pengeluaran". Peran tersebut telah berkembang selama bertahun-tahun menjadi 'Pemantau Integritas', 'Inspektur Jenderal Sektor Swasta Independen' (IPSIG) dan konsep 'kepatuhan' untuk beberapa nama. Itu juga telah digunakan di bidang-bidang di luar konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan. Dalam proyek konstruksi, 'Pemantau Integritas' ini telah berkembang – otoritas dari pengadaan pemerintah telah menyisihkan sebagian dari dana untuk kontrak untuk 'Pemantau Integritas', kemudian

kontraktor dipekerjakan melalui proses pengadaan. 'Pemantau Integritas' terdiri dari tim dengan keahlian yang relevan, seperti akuntansi, audit, investigasi, teknik, dll. Mereka akan memulai pekerjaan mereka dengan proses pengadaan, untuk memastikan proses pengadaan berjalan dengan adil dan melalui proses yang transparan; berlanjut hingga tahap konstruksi hingga akhir proyek.

Pekerjaan mereka didasarkan pada berbagai informasi satu sama lain. Penyidik mungkin berada di lokasi untuk mencari bukti korupsi dan pelanggaran lainnya (seperti mabuk, mencuri materi, dll). Insinyur akan memeriksa pekerjaan selesai seperti yang ditentukan dengan bahan yang sesuai. Auditor/akuntan akan memeriksa faktur yang mencerminkan pekerjaan dilakukan atau produk yang disediakan.

Ini adalah model yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah di Inggris mengadopsi. Penting juga untuk menekankan bahwa 'Pemantauan Integritas' melampaui audit eksternal tradisional, karena beberapa orang mungkin berpikir bahwa semua yang diperlukan untuk melindungi uang publik adalah audit yang lebih kuat. Memang seperti yang diungkapkan oleh Chief Executive Grant Thornton kepada House of Commons Komite Menjajaki peran audit eksternal dalam memerangi kecurangan: "Kami tidak mencari kecurangan dan kami tidak meramal masa depan dan kami tidak memberikan pernyataan bahwa akun-akun itu benar. Kami mengatakan mereka masuk akal, kami melihat masa lalu, dan kami tidak diatur untuk mencari kecurangan."

## **7. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sektor konstruksi adalah rawan kecurangan dan korupsi dibandingkan dengan banyak sektor lainnya. Ada keduanya alasan struktural dan budaya untuk ini dan berbagai jenis kecurangan dan korupsi yang umum terjadi telah diilustrasikan dalam laporan ini. Komitmen pemerintah ke semakin banyak proyek konstruksi besar sangat disambut baik, tetapi proyek-proyek ini datang dengan risiko kecurangan dan korupsi yang signifikan. Sumber daya publik yang langka tidak boleh ditempatkan pada risiko yang tidak semestinya dan jika biaya kecurangan dan korupsi dapat dikurangi, maka itu sumber daya dapat dikhususkan untuk tujuan penting lainnya.

Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari negara-negara lain, yang telah mengalami dan berupaya mengatasi masalah yang jauh lebih signifikan di sektor ini. Penegakan hukum tidak memberikan solusi sendirian. Pengalaman Integritas Monitor di AS memberikan opsi yang sangat menarik untuk mengurangi kecurangan dan pemborosan. Oleh karena itu, pemerintah harus secara aktif mempertimbangkan untuk menjajaki opsi untuk menyisihkan persentase minimum anggaran proyek agar fungsi tersebut dapat dibuat. Hal ini kemungkinan besar tidak hanya mengurangi tingkat kecurangan dan korupsi, tetapi juga mengurangi pemborosan dan kemungkinan peningkatan biaya yang tidak masuk akal.

## Tentang penulis



### **Jim Gee**

Mitra dan Kepala Nasional Layanan Forensik, Crowe UK  
Profesor Tamu dan Ketua Center pada Studi Kontra Penipuan,  
Universitas Portsmouth

Jim adalah Mitra dan Kepala Layanan Forensik Nasional di Crowe UK. Dia juga Profesor Tamu di University of Portsmouth dan Ketua Centre for Counter Fraud Studies (pusat terkemuka Eropa untuk penelitian penipuan dan masalah terkait) dan Ketua UK Fraud Costs Measurement Committee (badan lintas sektor) yang setiap tahunnya mengembangkan dan menerbitkan UK Annual Fraud Indicator. Selama lebih dari 25 tahun sebagai spesialis forensik, Jim telah memberi nasihat kepada Menteri, Komite Pemilihan Parlemen dan Jaksa Agung, serta perusahaan nasional dan multi-nasional, organisasi sektor publik utama dan beberapa badan amal paling terkemuka. Sampai saat ini ia telah bekerja dengan klien dari 41 negara. Jim mengkhususkan diri dalam membantu organisasi untuk mengurangi biaya dan kejadian penipuan melalui penguatan ketahanan terhadap penipuan proses dan sistem yang relevan.



### **Profesor Mark Tombol,**

Direktur Pusat Studi Kontra Penipuan di Institut Peradilan Pidana,  
Universitas Portsmouth

Mark adalah Direktur Centre for Counter Fraud Studies di Institute of Criminal Justice Studies, Universitas Portsmouth. Mark telah banyak menulis tentang kontra penipuan dan masalah kepolisian swasta, menerbitkan banyak artikel, bab dan menyelesaikan delapan buku dengan satu yang akan datang.

Beberapa proyek penelitian Mark yang paling signifikan termasuk memimpin penelitian atas nama National Fraud Authority dan ACPO tentang korban penipuan, Yayasan Nuffield tentang alternatif penuntutan pidana, Departemen Pengembangan Internasional tentang pengukuran penipuan, Acromas (AA dan Saga) di Cash-for-Crash fraudsters, Midlands Fraud Forum, dan Eversheds on 'Sanctioning Fraudsters'.. Mark juga bertindak sebagai konsultan untuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan dan Layanan Keamanan Swasta Sipil. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Badan Akreditasi Profesi Kontra Fraud.

Mark adalah mantan direktur Institut Keamanan. Sebelum bergabung dengan University of Portsmouth dia adalah Asisten Peneliti di Rt. Hon Bruce George MP yang mengkhususkan diri dalam masalah kepolisian, keamanan dan urusan dalam negeri. Mark menyelesaikan studi sarjananya di University of Exeter, Magister di University of Warwick dan Doktor di London School of Economics.



**Branislav Hock**

Dosen Senior,  
Ekonomi Kejahatan di Sekolah Kriminologi dan Kriminal  
Studi Keadilan di Universitas Portsmouth

Branislav adalah dosen Senior Kejahatan Ekonomi di Economic Crime at the School of Criminology and Criminal Justice Studies. Dia adalah penulis *Extraterritoriality and International Bribery: A Collective Action Perspective*, Routledge 2020.

Branislav telah terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian, banyak yang terkait dengan Kejahatan Ekonomi Transnasional, Anti-Korupsi, dan Kepatuhan. Branislav adalah anggota pendiri European Compliance Center. Dia juga bekerja untuk firma hukum di mana dia memberi nasihat tentang berbagai masalah kepatuhan. Sebelum bergabung dengan Portsmouth Branislav bekerja sebagai peneliti di European Compliance Center (TILEC), di mana ia menyelesaikan gelar PhD dalam hukum anti-korupsi. Branislav juga terlibat dalam berbagai proyek lain: misalnya, ia bekerja di Kantor Swasta European Court of Auditors keanggotaan Belanda pada audit kinerja yang mengukur efektivitas pengadaan publik Institusi Uni Eropa.



**David Shepherd**

Dosen Senior,  
Sekolah Kriminologi dan Peradilan Pidana  
Studi di Universitas Portsmouth

Sebelumnya seorang peneliti senior di Universitas Portsmouth, David sekarang menjadi dosen senior di Criminology and Criminal Justice di Portsmouth, yang berfokus pada kejahatan ekonomi. David telah bekerja secara ekstensif dengan Profesor Button meneliti metode pengukuran dan tingkat penipuan di Inggris, ketahanan organisasi dan iklim etika, dan akses keadilan bagi para korban. David dididik di Portsmouth, memperoleh gelar pertamanya (BSc) dan PhD.